



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan perubahan besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1327);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 113);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 23);

17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 57), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- (2) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.8.444.215.000,00 (delapan milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Alokasi DBH Pajak Daerah sebesar Rp.6.940.000.000,00(enam milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Alokasi DBH Retribusi Daerah sebesar Rp.1.504.215.000,00 (satu milyar lima ratus empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan :
- a. 60 % (enam puluh per seratus) dari pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa, yang selanjutnya disebut DBH Merata;
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dari pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing Desa, yang selanjutnya disebut DBH Proporsional;
- (5) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$DBH_x = DBH \text{ Merata} + DBH \text{ Proporsional}_x$$

Keterangan :

DBH_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa

DBH Merata : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata yang diterima Desa

$DBH \text{ Proporsional}_x$: DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa

- (6) DBH Merata untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan DBH Merata dibagi dengan jumlah Desa;
- (7) DBH Proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :
- $$\text{DBH Proporsional}_x = \text{BD}_x \times \text{DBH Proporsional}$$
- Keterangan :
- DBH Proporsional_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa
- BD_x : Nilai bobot Desa untuk Setiap Desa
- DBH Proporsional : Pagu DBH Proporsional
- (8) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas data bobot Desa dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Mengubah lampiran dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020
NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISTO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 71 TAHUN 2020
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 4
 TAHUN 2020 TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2020

| KODE | NAMA KECAMATAN / DESA | DBH PAJAK DAERAH | DBH RETRIBUSI DAERAH | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4 | 6 |
| 62.01.01 | KECAMATAN KUMAI | | | | |
| 62.01.01.2001 | Sungai Cabang | 52.171.300,00 | 11.989.300,00 | 64.160.600,00 | |
| 62.01.01.2002 | Teluk Pulai | 47.886.300,00 | 11.147.600,00 | 59.033.900,00 | |
| 62.01.01.2003 | Sabuai | 57.043.400,00 | 12.946.200,00 | 69.989.600,00 | |
| 62.01.01.2004 | Keraya | 55.458.500,00 | 12.637.300,00 | 68.095.800,00 | |
| 62.01.01.2005 | Teluk Bogam | 58.765.000,00 | 13.284.300,00 | 72.049.300,00 | |
| 62.01.01.2006 | Sungai Bakau | 62.284.600,00 | 13.975.600,00 | 76.260.200,00 | |
| 62.01.01.2007 | Kubu | 87.989.100,00 | 19.024.300,00 | 107.013.400,00 | |
| 62.01.01.2008 | Sungai Kapitan | 169.850.600,00 | 35.102.700,00 | 204.953.300,00 | |
| 62.01.01.2009 | Batu Belaman | 115.572.500,00 | 24.441.900,00 | 140.014.400,00 | |
| 62.01.01.2010 | Sungai Tendang | 157.221.500,00 | 32.622.200,00 | 189.843.700,00 | |
| 62.01.01.2014 | Sungai Sekonver | 56.483.400,00 | 12.836.200,00 | 69.319.600,00 | |
| 62.01.01.2015 | Sungai Bedaun | 54.025.300,00 | 12.353.400,00 | 66.378.700,00 | |
| 62.01.01.2017 | Bumi Harjo | 430.269.100,00 | 86.251.800,00 | 516.520.900,00 | |
| 62.01.01.2032 | Pangkalan Satu | 85.071.500,00 | 18.451.200,00 | 103.522.700,00 | |
| 62.01.01.2034 | Sabuai Timur | 47.859.200,00 | 11.142.300,00 | 59.001.500,00 | |
| | SUB TOTAL | 1.537.951.300,00 | 328.206.300,00 | 1.866.157.600,00 | |
| 62.01.02 | KECAMATAN ARUT SELATAN | | | | |
| 62.01.02.2001 | Tanjung Putri | 55.728.800,00 | 12.688.000,00 | 68.416.800,00 | |
| 62.01.02.2004 | Pasir Panjang | 484.831.500,00 | 96.968.400,00 | 581.799.900,00 | |
| 62.01.02.2010 | Rangda | 48.076.800,00 | 11.185.000,00 | 59.261.800,00 | |
| 62.01.02.2011 | Kenambui | 47.998.100,00 | 11.169.600,00 | 59.167.700,00 | |
| 62.01.02.2012 | Runtu | 51.000.200,00 | 11.759.200,00 | 62.759.400,00 | |
| 62.01.02.2013 | Umpang | 51.159.800,00 | 11.790.600,00 | 62.950.400,00 | |
| 62.01.02.2014 | Kumpai Batu Bawah | 79.088.900,00 | 17.276.200,00 | 96.365.100,00 | |
| 62.01.02.2015 | Kumpai Batu Atas | 53.179.200,00 | 12.187.200,00 | 65.366.400,00 | |
| 62.01.02.2016 | Natai Raya | 91.821.800,00 | 19.777.000,00 | 111.598.800,00 | |
| 62.01.02.2017 | Medang Sari | 88.998.800,00 | 19.222.600,00 | 108.221.400,00 | |
| 62.01.02.2018 | Natai Baru | 62.567.000,00 | 14.031.100,00 | 76.598.100,00 | |
| 62.01.02.2019 | Tanjung Terantang | 67.971.500,00 | 15.092.600,00 | 83.064.100,00 | |
| 62.01.02.2020 | Sulung | 72.659.700,00 | 16.013.400,00 | 88.673.100,00 | |
| | SUB TOTAL | 1.255.082.100,00 | 269.160.900,00 | 1.524.243.000,00 | |
| 62.01.03 | KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA | | | | |
| 62.01.03.2001 | Babuai Baboti | 53.923.900,00 | 12.333.500,00 | 66.257.400,00 | |
| 62.01.03.2002 | Tempayung | 57.387.300,00 | 13.013.700,00 | 70.401.000,00 | |
| 62.01.03.2003 | Sakabulin | 48.423.300,00 | 11.253.100,00 | 59.676.400,00 | |
| 62.01.03.2004 | Kinjil | 48.752.800,00 | 11.317.800,00 | 60.070.600,00 | |
| 62.01.03.2005 | Dawak | 79.430.700,00 | 17.343.300,00 | 96.774.000,00 | |
| 62.01.03.2006 | Riam Durian | 94.469.700,00 | 20.297.100,00 | 114.766.800,00 | |
| 62.01.03.2009 | Lalang | 50.504.900,00 | 11.662.000,00 | 62.166.900,00 | |
| 62.01.03.2010 | Rungun | 47.967.300,00 | 11.163.500,00 | 59.130.800,00 | |
| 62.01.03.2011 | Kondang | 53.730.700,00 | 12.295.500,00 | 66.026.200,00 | |
| 62.01.03.2012 | Suka Jaya | 48.499.100,00 | 11.268.000,00 | 59.767.100,00 | |
| 62.01.03.2013 | Sukamakmur | 87.868.200,00 | 19.000.500,00 | 106.868.700,00 | |
| 62.01.03.2014 | Sumber Mukti | 78.896.200,00 | 17.238.300,00 | 96.134.500,00 | |
| 62.01.03.2015 | Palih Baru | 79.760.100,00 | 17.408.000,00 | 97.168.100,00 | |
| 62.01.03.2016 | Ipuh Bangun Jaya | 69.238.700,00 | 15.341.500,00 | 84.580.200,00 | |
| 62.01.03.2017 | Sagu Suka Mulya | 62.230.500,00 | 13.965.000,00 | 76.195.500,00 | |
| | SUB TOTAL | 961.083.400,00 | 214.900.800,00 | 1.175.984.200,00 | |
| 62.01.04 | KECAMATAN ARUT UTARA | | | | |
| 62.01.04.2001 | Nanga Mua | 56.779.400,00 | 12.894.300,00 | 69.673.700,00 | |
| 62.01.04.2003 | Sukarami | 47.859.200,00 | 11.142.300,00 | 59.001.500,00 | |
| 62.01.04.2004 | Gandis | 47.859.200,00 | 11.142.300,00 | 59.001.500,00 | |
| 62.01.04.2005 | Kerabu | 47.859.200,00 | 11.142.300,00 | 59.001.500,00 | |
| 62.01.04.2006 | Sambi | 89.449.600,00 | 19.311.100,00 | 108.760.700,00 | |
| 62.01.04.2007 | Penyombaan | 47.859.200,00 | 11.142.300,00 | 59.001.500,00 | |
| 62.01.04.2008 | Pandau | 47.859.200,00 | 11.142.300,00 | 59.001.500,00 | |
| 62.01.04.2009 | Riam | 47.859.200,00 | 11.142.300,00 | 59.001.500,00 | |
| 62.01.04.2010 | Panahan | 51.518.700,00 | 11.861.100,00 | 63.379.800,00 | |
| 62.01.04.2011 | Sungai Dau | 47.859.200,00 | 11.142.300,00 | 59.001.500,00 | |
| | SUB TOTAL | 532.762.100,00 | 122.062.600,00 | 654.824.700,00 | |
| 62.01.05 | KECAMATAN PANGKALAN LADA | | | | |
| 62.01.05.2001 | Pangkalan Tiga | 204.220.400,00 | 41.853.300,00 | 246.073.700,00 | |
| 62.01.05.2002 | Pandu Senjaya | 253.494.100,00 | 51.531.200,00 | 305.025.300,00 | |
| 62.01.05.2003 | Lada Mandala Jaya | 110.223.800,00 | 23.391.400,00 | 133.615.200,00 | |
| 62.01.05.2004 | Makarti Jaya | 78.401.700,00 | 17.141.200,00 | 95.542.900,00 | |
| 62.01.05.2005 | Sumber Agung | 143.006.000,00 | 29.830.200,00 | 172.836.200,00 | |
| 62.01.05.2006 | Purbasari | 77.773.000,00 | 17.017.700,00 | 94.790.700,00 | |
| 62.01.05.2007 | Sungai Rangit Jaya | 86.750.900,00 | 18.781.000,00 | 105.531.900,00 | |
| 62.01.05.2008 | Pangkalan Dewa | 217.053.500,00 | 44.373.900,00 | 261.427.400,00 | |
| 62.01.05.2009 | Kadipi Atas | 59.181.200,00 | 13.366.100,00 | 72.547.300,00 | |

| KODE | NAMA KECAMATAN / DESA | DBH PAJAK DAERAH | DBH RETRIBUSI DAERAH | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4 | 6 |
| 62.01.05.2010 | Sungai Melawen | 106.114.200,00 | 22.584.200,00 | 128.698.400,00 | |
| 62.01.05.2011 | Pangkalan Durin | 109.336.000,00 | 23.217.000,00 | 132.553.000,00 | |
| | SUB TOTAL | 1.445.554.800,00 | 303.087.200,00 | 1.748.642.000,00 | |
| 62.01.06 | KECAMATAN PANGKALAN BANTENG | | | | |
| 62.01.06.2001 | Pangkalan Banteng | 78.511.700,00 | 17.162.800,00 | 95.674.500,00 | |
| 62.01.06.2002 | Mulya Jadi | 58.766.900,00 | 13.284.700,00 | 72.051.600,00 | |
| 62.01.06.2003 | Karang Mulya | 102.573.900,00 | 21.888.900,00 | 124.462.800,00 | |
| 62.01.06.2004 | Kebun Agung | 68.565.100,00 | 15.209.200,00 | 83.774.300,00 | |
| 62.01.06.2005 | Sidomulyo | 78.901.100,00 | 17.239.300,00 | 96.140.400,00 | |
| 62.01.06.2006 | Marga Mulya | 62.540.300,00 | 14.025.800,00 | 76.566.100,00 | |
| 62.01.06.2007 | Amin Jaya | 91.110.400,00 | 19.637.300,00 | 110.747.700,00 | |
| 62.01.06.2008 | Arga Mulya | 79.447.800,00 | 17.346.600,00 | 96.794.400,00 | |
| 62.01.06.2009 | Natai Kerbau | 71.719.700,00 | 15.828.800,00 | 87.548.500,00 | |
| 62.01.06.2010 | Simpang Berambai | 64.846.100,00 | 14.478.700,00 | 79.324.800,00 | |
| 62.01.06.2011 | Sungai Hijau | 66.314.200,00 | 14.767.100,00 | 81.081.300,00 | |
| 62.01.06.2012 | Sungai Pakit | 72.654.600,00 | 16.012.400,00 | 88.667.000,00 | |
| 62.01.06.2013 | Berambai Makmur | 62.312.200,00 | 13.981.000,00 | 76.293.200,00 | |
| 62.01.06.2014 | Karang Sari | 66.003.800,00 | 14.706.100,00 | 80.709.900,00 | |
| 62.01.06.2015 | Sungai Pulau | 63.515.900,00 | 14.217.400,00 | 77.733.300,00 | |
| 62.01.06.2016 | Sungai Bengkuang | 48.444.200,00 | 11.257.200,00 | 59.701.400,00 | |
| 62.01.06.2017 | Sungai Kuning | 71.338.400,00 | 15.753.900,00 | 87.092.300,00 | |
| | SUB TOTAL | 1.207.566.300,00 | 266.797.200,00 | 1.474.363.500,00 | |
| | TOTAL | 6.940.000.000,00 | 1.504.215.000,00 | 8.444.215.000,00 | |

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KSN0 PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009